

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM dapat dijabarkan sebagai pemilik usaha berskala kecil yang masih mengelola usahanya dengan cara yang sederhana. Dalam perkembangannya, UMKM menjadi semakin menjamur karena adanya kesadaran masyarakat dalam memulai untuk menjadi wirausahawan. UMKM dinilai memiliki andil dan peluang besar dalam menunjang perekonomian, baik perekonomian para pelaku UMKM maupun perekonomian negara.

UMKM diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/penghasilan tahunan paling banyak Rp600.000.000,- atau aset/harta paling banyak Rp. 600.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati), sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994, tanggal 27 Juni 1994. Badan-badan tersebut antara lain: (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi); dan (2) perseorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah tiga tingkatan yang dapat dibagi menjadi UMKM. Berikut ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti yang sudah diatur dalam undang-undang,

2) Usaha Kecil

Usaha kecil menurut UU No 20 Tahun 2008 merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang sudah dimaksudkan dalam Undang-undang.

3) Usaha Menengah

Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2008 merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut lagi dalam pengklasifikasiannya, tingkatan UMKM berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- 1) Kriteria Usaha Mikro yaitu jika memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil: Perusahaan yang memenuhi persyaratan ini dapat menerima kredit bank hingga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) serta mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hasil penjualan setiap tahunnya.
- 3) Usaha yang memenuhi kriteria usaha menengah, tidak termasuk properti dan bangunan, bernilai antara Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juga dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perkembangan UMKM di Indonesia begitu pesat, hal itu ditandai dengan begitu maraknya pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah UMKM yang ada di Indonesia mencapai angka 64,19 juta pelaku. Jumlah tersebut naik signifikan dari tahun 2012 yang hanya mencapai 56 juta pelaku UMKM. Hal ini sangat erat kaitannya dengan adanya pandemi Covid-19 yang menuntut masyarakat untuk lebih kreatif dan mengembangkan usaha guna kepentingan bertahan di tengah situasi pandemi.

Lebih khusus lagi, dalam cakupan wilayah Kabupaten Pati jumlah pelaku UMKM pada tahun 2020 adalah sebesar 14.003 pelaku usaha. Jumlah tersebut naik sebesar 1.200 dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 12.803 pelaku usaha. Berikut ada rincian data UMKM Kabupaten Pati tahun 2020 :

Tabel 4.1
Jumlah UMKM Kabupaten Pati tahun 2020

No.	Bidang Usaha	Jumlah		
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	620	50	4
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3	Industri Pengolahan	8.511	466	50
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	13	-	-
5	Bangunan	30	8	1
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.520	297	23
7	Pengangkutan dan Komunikasi	47	19	-
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perumahan	44	22	2
9	Jasa-jasa swasta	1.184	92	-
Jumlah 2020		12.969	954	80
Jumlah 2019		11.769	954	80

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati

Sampel yang peneliti ambil dalam penelitian kali ini adalah terhadap beberapa UMKM yang terletak di Kabupaten Pati. Peneliti melakukan pengambilan data pada 6 pelaku UMKM. Berikut disajikan data rincian sampel dalam penelitian :

Tabel 4.2
Sampel Penelitian

No.	Nama UMKM	Hasil Penjualan Tahunan	Kriteria Usaha
1.	Batik Trisula	Rp 120.000.000	Usaha Kecil
2.	Batik Pamelu Bageng	Rp 12.000.000	Usaha Mikro
3.	Vika Laundry	Rp 180.000.000	Usaha Kecil
4.	Pengolahan Tahu Dodi	Rp 36.000.000	Usaha Mikro
5.	Alyya Food	Rp 120.000.000	Usaha Kecil
6.	MJ Hijab	Rp 12.000.000	Usaha Mikro

Sumber : Olahan Peneliti (2023)

Profil tentang UMKM yang dijadikan sampel oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1) Batik Trisula

Batik Trisula sering juga disebut dengan Batik Langse oleh masyarakat. Usaha ini tergolong dalam usaha kecil yang

berdiri sejak tahun 2015. Dalam pemasarannya, UMKM Batik Trisula menggunakan metode klister, bekerjasama dengan pemerintah daerah hingga memasarkan langsung kepada customer dan memajang hasil batik di display atau toko.

2) Batik Pamelu Bageng

Batik Pamelu Bageng adalah usaha yang bergerak dalam produksi batik dengan ciri khas bermotif bentuk jeruk pamelu. Usaha ini tergolong dalam usaha mikro yang berdiri sejak 2019. Dalam pemasarannya, UMKM Batik Pamelu Bageng memasarkan produknya secara online di marketplace shopee, media sosial facebook dan whatsapp dan tidak memasarkan secara offline.

3) Vika Laundry

Vika Laundry adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa laundry. Usaha ini tergolong dalam usaha kecil yang berdiri sejak bulan Agustus tahun 2018. Dalam pemasarannya, vika laundry menggunakan metode pemasaran online melalui media sosial facebook dan whatsapp.

4) Pengolahan Tahu Dodi

Sesuai dengan namanya, Pengolahan Tahu Dodi merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang olahan berbagai jenis tahu seperti tahu bakso, tahu mercon hingga tahu *walik*. Usaha ini tergolong dalam usaha mikro yang berdiri sejak tahun 2019. Dalam pemasarannya, UMKM Pengolahan Tahu Dodi melakukan secara offline dengan memasarkan ke pasar tradisional dan kepada para pedagang sayur keliling.

5) Alyya Food

Alyya Food merupakan sebuah usaha pengolahan keripik tempe. Usaha ini tergolong dalam usaha kecil yang sudah berdiri sejak 2012. Dalam pemasarannya, Alyya Food mulanya melakukan secara offline via ruko yang terletak di alun-alun Pati, namun sekarang membuka di rumah dan memasarkan online melalui facebook, shopee, Lazada dan whatsapp.

6) MJ Hijab

MJ Hijab adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pembuatan hijab. Usaha ini tergolong dalam usaha mikro yang sudah berdiri sejak Juli 2017. Untuk pemasarannya, MJ Hijab menggunakan metode online dan offline, dengan menyetorkan ke beberapa toko dan memasarkan lewat media sosial.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kesiapan Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati

Berdasarkan teori kesiapan, dalam proses implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati dikategorikan dalam 3 indikator yang meliputi Persepsi UMKM terhadap Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung. Ketiga indikator tersebut dijadikan landasan dalam mengetahui sampai seberapa jauh kesiapan UMKM di Kabupaten Pati dalam menerapkan SAK EMKM pada usahanya. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Persepsi UMKM terhadap Laporan Keuangan

Indikator pertama dalam teori kesiapan ialah persepsi UMKM terhadap laporan keuangan. Persepsi sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Persepsi adalah suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris.

Persepsi seorang pelaku UMKM terhadap laporan keuangan menjadi satu hal yang perlu diketahui dalam mencari informasi tentang kesiapan pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM. Dalam beberapa kasus yang sering terjadi, para pelaku UMKM cenderung sering abai terhadap proses laporan yang sistematis. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Laporan Keuangan sendiri adalah sarana komunikasi yang memadatkan semua kegiatan perusahaan dan disajikan dalam bentuk laporan neraca dan laporan laba rugi pada titik waktu tertentu. Pernyataan ini pada akhirnya digunakan sebagai alat informasi untuk membuat kebijakan atau keputusan oleh pengguna laporan keuangan, berdasarkan fungsinya masing-masing. Menurut Asosiasi Akuntansi Indonesia, laporan keuangan merupakan bagian integral dari proses pelaporan. Laporan keuangan lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam format yang berbeda, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), serta catatan yang menyertainya dan bahan penjelasan. Selain itu, jadwal dan informasi tambahan yang terkait dengan laporan, seperti informasi keuangan, segmen industri dan geografis, dan pengungkapan dampak perubahan harga, juga disertakan.

Pekerja UMKM Batik Trisula ketika diwawancarai menjelaskan bahwa pada UMKM Batik Trisula belum menerapkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Beliau berpendapat bahwa penerapan SAK EMKM memang seharusnya dilakukan, namun dalam proses pelaporannya kepada atasan terdapat format yang berbeda. Format pelaporan yang lebih sederhana adalah suatu format yang diminta dari pimpinan UMKM Batik Trisula. Dengan demikian, pada UMKM Batik Trisula sudah menggunakan laporan keuangan namun belum menerapkan SAK EMKM.

“Kalau buat laporan disini ya memang saya buat terus mbak, selalu saya catat. Cuma ya gak sesuai sama SAK, saya disini ngikutnya format dari paguyuban batik mbak, jadi biar sama”⁷²

Lebih lanjut lagi, beliau menilai bahwa pelaporan yang berdasarkan pada SAK EMKM memang sudah seharusnya diterapkan, namun dalam praktiknya belum dapat diterapkan pada UMKM Batik Trisula.

“Penting banget si mbak, itu yang paling penting sebenarnya biar bisa lebih rapi dan rinci”⁷³

Pemaparan dari UMKM Batik Trisula kemudian direduksi dan didapatkan poin pokok yaitu UMKM Batik Trisula memiliki pandangan positif terhadap adanya laporan keuangan. UMKM Batik Trisula memandang laporan keuangan menjadi hal yang penting dan patut untuk diterapkan. Walaupun dalam prosesnya masih menggunakan bentuk laporan keuangan secara sederhana.

Sementara itu, dari UMKM Batik Pamelu Bageng menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan proses pencatatan keuangan. Namun, pencatatan yang dilakukan masih sederhana dan tidak sesuai dengan SAK EMKM. Pelaku Batik Pamelu juga menambahkan bahwa pencatatan transaksi yang sesuai dengan kaidah akuntansi dapat memudahkan pelaku UMKM.

“Saya pakainya aplikasi mbak, dulu pakai aplikasi bukukas sekarang pakainya aplikasi bukuwarung. Nggak tau itu sudah sesuai sama standar apa nggak,

⁷² Siswanto, Wawancara oleh Penulis, 1 September 2023, Wawancara 1, Transkrip.

⁷³ Siswanto.

usahanya masih kecil mbak yang penting saya catat gitu aja”⁷⁴

Pemaparan UMKM Batik Pamelu kemudian dapat disimpulkan bahwa Batik Pamelu memiliki pandangan positif akan laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menjadi sesuatu yang baik untuk dilakukan. Pihak Batik Pamelu pun telah menerapkan laporan keuangan dengan bantuan aplikasi android.

UMKM Alyya Food juga memberikan tanggapan yang selaras dengan UMKM Batik Trisula dan UMKM Batik Pamelu Bageng. Pelaku UMKM Alyya Food berpendapat bahwa pencatatan keuangan memang penting. Namun dalam realitanya beliau belum bisa menerapkannya pada Alyya Food.

“Pencatatannya standar biasa, manual. Pembukuan si penting mbak, cuma belum bisa diterapkan. Kerjanya kan nggak cuma satu, kalau pagi ngajar terus masih goreng juga jadi nggak ada waktu”⁷⁵

Alyya Food memaparkan bahwa pencatatan sudah dilakukan namun masih dalam skala sederhana. Ini menjadi bukti bahwa Alyya Food memandang laporan keuangan sebagai sebuah hal yang positif. Walaupun pada praktiknya masih belum dapat diterapkan secara maksimal.

Sementara itu, pada UMKM Vika Laundry dan Pengolahan Tahu Dodi belum melakukan proses pembukuan atau pencatatan dalam usaha yang digelutinya. Penggunaan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan dan modal usaha selanjutnya. Proses pencatatan tidak dilakukan pada kedua UMKM tersebut.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan sebuah roda usaha, tentunya sangat diperlukan sebuah sumber daya. Salah satu sumber daya yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri dapat didefinisikan sebagai individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai

⁷⁴ Umayyah, Wawancara oleh Penulis, 2 September 2023, Wawancara 2, Transkrip

⁷⁵ Restutik, Wawancara oleh Penulis, 13 September 2023, Wawancara 5, Transkrip.

aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan semakin baik pula pencapaian yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, sumber daya manusia yang kurang mumpuni juga akan berdampak buruk pada capaian UMKM. Dalam hal kesiapan implementasi SAK EMKM juga diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dan dapat menerapkan SAK EMKM pada UMKM yang digelutinya.

Ketika diwawancarai oleh peneliti, pihak UMKM Batik Trisula mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pencatatan keuangan dan telah memahami perihal akuntansi. Dalam UMKM Batik Trisula juga sudah terdapat bagian tersendiri yang bertugas membuat pencatatan keuangan. Namun aspek-aspek yang dicatat masih sederhana dan belum sesuai dengan kaidah SAK EMKM.

“Iya selalu saya catat, saya tau soal akuntansi dulu waktu sekolah. Dulu juga pernah ada pelatihan, Cuma ya hanya sekali aja jadi nggak begitu paham”⁷⁶

Meninjau pemaparan dari UMKM Batik Trisula dapat direduksi data bahwa sumber daya manusia sebenarnya telah memahami soal dasar akuntansi namun belum dapat memahami secara utuh karena pelatihan yang pernah diikuti hanya berlangsung selama satu kali saja. Senada dengan Batik Trisula, pelaku UMKM Batik Pamelu Bageng juga menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pencatatan keuangan namun tidak secara detail. Dalam prosesnya, UMKM Batik Pamelu masih dikelola oleh satu orang saja sehingga tidak memiliki pegawai yang secara khusus mengurus tentang laporan keuangan. Laporan yang dibuat pun terbatas pada hal-hal yang sederhana saja.

“iya pernah buat catatan keuangan, tapi secara detail ya nggak. Disini nggak ada karyawan tetap, kalau lagi rame baru saya manggil temen”⁷⁷

Pemaparan Batik Pamelu tersebut mengindikasikan bahwa sumber daya manusia belum memadai untuk membuat catatan keuangan sehingga yang dilakukan hanya hal-hal sederhana saja. Sementara itu, MJ Hijab ketika

⁷⁶ Siswanto.

⁷⁷ Umayyah.

diwawancarai berpendapat bahwa pihaknya melakukan pencatatan keuangan secara manual. Pihak MJ Hijab telah menyatakan bahwa kegiatan laporan keuangan adalah hal yang penting supaya lebih baik dalam mengatur keuangan. Namun, pihak MJ Hijab mengakui belum bisa melaksanakannya sesuai dengan SAK EMKM.

“Nggak ada mbak, paling ya dicatat manual sama diingat-ingat. Kalau uang pribadi sama usaha si udah dipisah tapi buat manajemen keuangannya masih dicatat manual aja”⁷⁸

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh MJ Hijab masih belum memadai untuk melakukan proses laporan berdasarkan SAK EMKM. Kegiatan pencatatan masih dilakukan secara sederhana dan manual. Kegiatan keuangan sudah dilakukan secara terpisah antara keuangan pribadi dan keuangan usaha.

c. Sarana Pendukung

Upaya dalam mencapai sebuah keberhasilan tentu memerlukan aspek-aspek pendukung yang dapat memperbesar kemungkinan tercapainya keberhasilan. Hal yang sama juga terjadi dalam proses menuju kesiapan implementasi SAK EMKN pada UMKM di Kabupaten Pati. Beberapa faktor atau aspek tentu diperlukan sebagai penunjang keberhasilan implementasi SAK EMKM. Salah satu aspek penting yang berperan dalam menunjang kesiapan penerapan SAK EMKM ialah saran pendukung.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Sarana dapat memuluskan langkah dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Jika segala sesuatu yang menunjang dalam proses pencapaian tujuan tersedia dengan kompleks, maka langkah mencapai tujuan tersebut akan lebih mudah untuk digapai.

Langkah sebagai kesiapan implementasi SAK EMKM yang ditinjau dari segi sarana pendukung sangat penting untuk dipenuhi. Sarana-sarana penunjang seperti buku laporan keuangan, aplikasi atau software pengolah laporan keuangan hingga device berupa laptop maupun perangkat komputer yang memadai sangat dibutuhkan sebagai langkah

⁷⁸ Uswatun Iklimah, Wawancara oleh Penulis, 15 September 2023, Wawancara 6, Transkrip.

penerapan SAK EMKM. Akan tetapi, dalam ranah UMKM yang dijadikan sampel sebagian besar belum memiliki atau memanfaatkan sarana pendukung dengan maksimal.

Keterangan yang diberikan oleh pelaku UMKM Batik Trisula menuturkan bahwa pihaknya masih menggunakan buku catatan keuangan dan proses pencatatan keuangan pun masih menggunakan cara manual. Batik Trisula belum menggunakan laptop serta aplikasi yang dapat menunjang pelaporan keuangan sesuai dengan standar SAK EMKM.

“Masih pakai buku biasa kayak gini”⁷⁹

Sedikit berbeda dengan Batik Trisula, UMKM Batik Pamelolo Bageng telah memanfaatkan aplikasi berbasis android dalam melakukan pencatatan keuangan mereka. Selain menggunakan aplikasi berbasis android (aplikasi buku warung), pihak UMKM Batik Pamelolo juga mendownload hasil catatan laporan keuangan yang kemudian dijadikan arsip. Untuk sarana pendukung lainnya berupa laptop atau device yang mumpuni serta buku laporan keuangan belum terpenuhi.

“saya pakainya aplikasi buku warung mbak, dulu namanya buku kas”⁸⁰

Sementara itu, dari UMKM Alyya Food ketika dimintai keterangan menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki buku keuangan secara tetap. Pencatatan keuangan hanya dilakukan secara manual pada sekumpulan kertas yang kemudian dikumpulkan ketika akan *direview*. Device dan software juga tidak dimanfaatkan dalam pencatatan keuangan UMKM Alyya Food.

“saya nyatatnya ya kayak kemarin gitu mbak, manual di kertas”⁸¹

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, maka dapat dilakukan reduksi data dengan menarik pokok bahasan dari masing-masing UMKM. UMKM Batik Trisula memiliki sarana pendukung berupa buku catatan keuangan yang berguna untuk menunjang proses laporan keuangan. Demikian juga dengan pihak UMKM Alyya Food, MJ Hijab dan Batik Pamelolo. Yang menjadi sedikit berbeda adalah pihak Batik Pamelolo telah memanfaatkan aplikasi android

⁷⁹ Siswanto.

⁸⁰ Umayyah.

⁸¹ Restutik.

yang digunakan sebagai sarana pendukung proses laporan keuangan. Kemudian untuk UMKM Pengolahan Tahu Dodi dan Vika Laundry masih belum memiliki sarana penunjang apapun baik itu buku, laptop maupun aplikasi laporan keuangan.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi SAK EMKM oleh UMKM di Kabupaten Pati

Implementasi atau penerapan ialah sebuah tindakan atau kegiatan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai tujuan. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi dapat dikatakan juga sebagai proses realisasi terhadap suatu hal tertentu.

Sebuah penerapan atau implementasi atau realisasi terhadap suatu hal tertentu tidak akan berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Setiap implementasi kebijakan tentu memiliki hambatannya masing-masing. Seperti halnya yang terjadi pada implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat SAK EMKM.

Studi kasus yang meneliti pada beberapa UMKM di Kabupaten Pati telah menemukan beberapa hambatan dalam proses implementasi SAK EMKM. Hambatan-hambatan tersebut berupa tidak tersedianya waktu, kurangnya pengetahuan tentang SAK EMKM hingga kurangnya sumber daya manusia yang mengurus pelaporan keuangan berstandar SAK EMKM. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Kurangnya waktu dalam pembuatan laporan keuangan dengan SAK EMKM

Kendala pertama yang ditemui dalam implementasi SAK EMKM adalah tidak adanya waktu bagi para pelaku UMKM untuk mengurus laporan keuangan berstandar SAK EMKM. Para pelaku UMKM cenderung masih sendirian dan belum memperkerjakan seseorang dalam mengurus laporan keuangannya. Beberapa pelaku UMKM juga masih fokus dalam proses produksi yang membuat waktu mereka terkuras dan tidak dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Wawancara dengan pihak Vika Laundry menjelaskan bahwa mereka cenderung menyelesaikan pesanan yang datang dan membuat waktu untuk pembuatan laporan keuangan tidak ada lagi. Proses pencatatan pun tidak dilakukan sehingga tidak tahu mengenai rincian laporan

keuangan yang sebenarnya. Yang dilakukan oleh Vika Laundry hanya sebatas pengumpulan nota-nota saja.

“Gak ada catatan keuangan mbak, gak ada waktunya, yang penting untung aja”⁸²

Selaras dengan yang disampaikan oleh Vika Laundry, pihak UMKM Alyya Food juga membenarkan bahwa waktu untuk membuat laporan keuangan dengan SAK EMKM tidak tersedia. Beliau menjelaskan bahwa kegiatannya sebagai seorang guru di pagi hari dan dilanjut produksi keripik tempe pada sore hari membuatnya kelelahan dan tidak cukup waktu untuk mengurus laporan keuangan SAK EMKM. Alhasil laporan keuangan pun hanya sebatas formalitas catatan biasa saja.

“Nggak ada waktunya mbak, saya kalau pagi kan ngajar, siangnya harus produksi dan sorenya itu ada pengiriman”⁸³

b. Kurangnya pengetahuan seputar SAK EMKM

Minimnya pengetahuan seputar SAK EMKM menjadi hambatan dalam implementasi SAK EMKM oleh UMKM di Kabupaten Pati. Beberapa pelaku UMKM menyatakan belum mengetahui tentang SAK EMKM. Beberapa pelaku UMKM mengaku masih awam dan tidak paham tentang bagaimana cara pembuatan laporan keuangan dengan SAK EMKM.

Pemaparan dari UMKM Pengolahan Tahu Dodi menyatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu tentang SAK EMKM. Dalam prosesnya juga beliau tidak melakukan pencatatan keuangan. Yang menjadi fokusnya hanyalah keuntungan yang didapatkan saja.

“Apa itu mbak? Yang penting uang yang didapat itu bisa diputer lagi buat modal mbak, sisanya saya bawa pulang”⁸⁴

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari pemilik UMKM MJ Hijab. Dalam pemaparannya, pihak MJ Hijab mengaku telah mengikuti pelatihan bisnis secara online di *facebook*, namun tidak pernah dijelaskan tentang

⁸² Yuni Nuri, Wawancara oleh Penulis, 5 September 2023, Wawancara 3, Transkrip.

⁸³ Restutik.

⁸⁴ Dodi, Wawancara oleh Penulis, 5 September 2023, Wawancara 4, Transkrip..

SAK EMKM. Hal tersebut membuatnya tidak mengetahui tentang apa itu SAK EMKM.

“Saya sering ikut pelatihan bisnis di facebook mbak, diajarin manajemen bisnis gitu, tapi kalau SAK EMKM gak pernah dijelasin”⁸⁵

c. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Pati terkait dengan implementasi SAK EMKM adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidang laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Beberapa pelaku usaha masih memiliki jumlah karyawan yang terbatas dan hanya terfokus pada proses produksi saja. Beberapa diantaranya bahkan hanya dibantu oleh pihak keluarga dan sanak saudara, juga ada yang hanya memanggil karyawan ketika dalam situasi tertentu saja, misalnya ketika sedang ramai pesanan dan kewalahan dalam proses produksi. Hal tersebut kemudian membuat pihak UMKM tidak memiliki seseorang yang secara khusus mengurus bagian laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Hasil wawancara dengan pihak UMKM Alyya Food menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki karyawan khusus yang mengurus bidang laporan keuangan. Pihaknya hanya memperkerjakan orang untuk proses produksi keripik tempe. Selain itu, ada orang yang diajak kerjasama oleh pihak Alyya Food namun sebagai agen pengiriman bukan dalam bidang akuntansi.

“Yang ngurus saya sendiri mbak”⁸⁶

Hal senada juga disampaikan oleh UMKM MJ Hijab, beliau menjelaskan bahwa dirinya memiliki keinginan untuk membuat laporan sesuai SAK EMKM. Namun pihak MJ Hijab juga menjelaskan bahwa pihaknya terkendala oleh sumber daya yang ada. Keterbatasan tersebut membuat tidak terlaksananya laporan keuangan dengan SAK EMKM.

“Pengen si mbak tau SAK EMKM, tapi usahanya masih kecil, belum ada yang ngurus itu”⁸⁷

⁸⁵ Uswatun Iklimah.

⁸⁶ Restutik.

⁸⁷ Uswatun Iklimah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Kesiapan Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati

Sebagai upaya untuk kesiapan para pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM di Kabupaten Pati, tentunya memerlukan usaha-usaha yang dapat menunjang persiapan masing-masing UMKM. SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah) merupakan aturan dasar akuntansi finansial yang lebih mudah dipahami dan dipaplikasikan dibandingkan dengan standar akuntansi sebelumnya (SAK ETAP) sebab berkaitan dengan transaksi umum yang telah dikerjakan oleh EMKM. Per 1 Januari 2018, IAI telah mulai memberlakukan SAK EMKM sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan bagi para pelaku usaha. Namun, dalam prosesnya masih banyak hal yang perlu dipelajari sehingga para pelaku UMKM dapat menerapkan SAK EMKM dengan semestinya seperti anjuran dari IAI.

Banyaknya kasus temuan yang memperlihatkan kurangnya UMKM dalam menerapkan SAK EMKM ini menjadi perhatian khusus yang perlu dianalisis. Seperti halnya yang terjadi pada UMKM yang ada di Kabupaten Pati, penerapan SAK EMKM perlu ditinjau lebih lanjut lagi. Hal ini berkaitan dengan kesiapan para pelaku UMKM di Kabupaten Pati terkait dengan implementasi atau penerapan SAK EMKM pada usaha yang digelutinya. Dalam meninjau tingkat kesiapan para pelaku UMKM di Kabupaten Pati, maka peneliti menggunakan teori kesiapan dalam meninjaunya. Dalam teori kesiapan, terdapat 3 indikator yaitu Persepsi Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung.

a. Persepsi Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan

Persepsi adalah sebuah interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal. Persepsi dapat dikatakan pula sebagai sudut pandang. Dalam hal melihat sesuatu, persepsi seseorang dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

Sebagai upaya dalam mengukur kesiapan para pelaku UMKM di Kabupaten Pati, langkah yang dapat dilihat salah satunya adalah dengan menilai persepsi para pelaku UMKM itu sendiri. Dalam studi kasus yang dilakukan kepada sampel yang terdiri dari 6 pelaku UMKM di Kabupaten Pati mendapatkan hasil yang cukup beragam. Beberapa respon

didapatkan melalui sebuah proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Para pelaku UMKM di Kabupaten Pati yang terdiri dari UMKM Batik Trisula, Batik Pamelu Bageng, Vika Laundry, Pengolahan Tahu Dodi, Alyya Food dan MJ Hijab memiliki persepsi yang berbeda dalam melihat laporan keuangan. Dalam ranah ini, persepsi positif adalah persepsi yang melihat laporan keuangan sebagai sesuatu yang penting dan bermanfaat pada usahanya. Sebaliknya, persepsi negatif ialah persepsi yang memandang bahwa laporan keuangan sebagai sebuah hal yang tidak penting, tidak perlu dan tidak bermanfaat dalam usaha yang dibidangi.

Respon pertama datang dari pelaku UMKM Batik Trisula, pelaku Batik Trisula memberikan tanggapan positif terkait pandangannya terhadap laporan keuangan. Batik Trisula menilai bahwa laporan keuangan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah bidang usaha. Lebih lanjut lagi, pihak Batik Trisula memiliki keinginan lebih untuk memperdalam kemampuan dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat keinginan yang kuat dalam diri pelaku UMKM Batik Trisula. Keinginan yang demikian juga menandakan sebuah pandangan positif terhadap penerapan SAK Akuntansi. Kegiatan berupa laporan keuangan pun dinilai vital dalam usaha Batik Trisula dengan mengadakannya secara rutin.

Pendapat selanjutnya merupakan sebuah persepsi dari usaha yang juga bergerak di bidang batik yaitu Batik Pamelu Bageng. Dalam memberikan persepsinya, pelaku usaha Batik Pamelu Bageng memandang laporan keuangan adalah hal yang penting dalam dunia usaha. Akuntansi dinilai menjadi hal yang memudahkan dalam melihat manajemen keuangan.

Selain itu, Batik Pamelu Bageng juga menerapkan pencatatan keuangan dengan bantuan aplikasi android. Dengan demikian menunjukkan bahwa Batik Pamelu Bageng memiliki pandangan atau persepsi positif terhadap laporan keuangan pada bidang UMKM yang dimilikinya. Hal tersebut menjadikannya sebagai UMKM yang mendukung adanya penerapan SAK EMKM pada UMKM.

UMKM Vika Laundry, memberikan persepsi bersebrangan dengan dua UMKM sebelumnya. Pihak Vika

Laundry memandang kegiatan pencatatan laporan keuangan yang sistematis bukan sebagai hal yang perlu dilakukan dalam usahanya. Sudut pandang ini dibarengi pula dengan tidak adanya proses pencatatan dalam berjalannya usaha laundry. Persepsi tersebut menguatkan bahwa Vika Laundry memandang negatif proses laporan keuangan.

Respon yang selanjutnya diberikan oleh UMKM Pengolahan Tahu Dodi. Persepsi yang diberikan oleh Pengolahan Tahu Dodi terhadap laporan keuangan adalah sebuah persepsi negatif. Pengolahan Tahu Dodi menilai bahwa pencatatan tidak terlalu penting dalam bidang usahanya. Hal tersebut didasari atas Tindakan yang dilakukan dengan hanya mengambil uang untuk modal selanjutnya tanpa mencatat pada laporan keuangan. Selanjutnya hasil keuntungan langsung dipakai dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Kegiatan tersebut mencerminkan sebuah sudut pandang negatif terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan juga tidak dapat diterapkan oleh Pengolahan Tahu Dodi karena adanya keterbatasan waktu. Selain itu, pihaknya menilai hal terpenting adalah keuntungan dan pencatatan tidak perlu dilakukan.

Persepsi berikutnya diberikan oleh UMKM yang bergerak di bidang produksi keripik tempe yaitu Alyya Food. Alyya Food memberikan pandangan bahwa kegiatan pencatatan laporan keuangan adalah salah satu hal yang penting dalam kegiatan usaha. Alyya Food menilai bahwa dengan pencatatan yang baik akan membuat manajemen perusahaan menjadi baik pula.

Persepsi tersebut menandakan bahwa Alyya Food memiliki pandangan positif dalam melihat adanya laporan keuangan dalam bidang usaha. Alyya Food juga telah melakukan praktik penerapan laporan keuangan walaupun belum sesuai dengan SAK EMKM. Namun, pandangan dari Alyya Food sudah dapat dikatakan sebagai pandangan yang positif terhadap penerapan laporan keuangan usaha.

Tanggapan terakhir diberikan oleh UMKM yang bergerak dalam bidang produksi hijab yaitu MJ Hijab. MJ Hijab memberikan pandangannya terhadap laporan keuangan sebagai bagian yang penting dalam usaha. Pembuatan laporan keuangan dinilai menjadi hal yang bagus supaya dapat lebih mengatur keuangan UMKM. Pemisahan

antara uang pribadi dengan uang usaha juga telah dilakukan oleh UMKM MJ Hijab.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah persepsi yang positif. Hal tersebut semakin didukung dengan adanya keinginan dari MJ Hijab untuk bisa belajar lebih lanjut terkait SAK EMKM. Walaupun dalam praktiknya, pihak MJ Hijab belum menerapkan SAK EMKM namun setidaknya laporan keuangan sudah dilakukan dengan manual dan sederhana.

Beberapa respon dari sampel UMKM tersebut menunjukkan diferensiasi dalam pandangannya terhadap kegiatan laporan keuangan. Namun, secara garis besar para pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap adanya laporan keuangan pada bidang UMKM. Secara sederhana, persepsi UMKM di Kabupaten Pati adalah :

Tabel 4.3
Persepsi UMKM terhadap Laporan Keuangan

No.	Nama UMKM	Persepsi yang Diberikan
1.	Batik Trisula	Positif
2.	Batik Pamelobageng	Positif
3.	Vika Laundry	Negatif
4.	Pengolahan Tahu Dodi	Negatif
5.	Alyya Food	Positif
6.	MJ Hijab	Positif

Sumber : Olahan Peneliti (2023)

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah suatu kemampuan yang ada pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. Sumber daya manusia sangat menentukan proses berjalannya sebuah usaha dari suatu perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan komponen penting dalam menjalannya roda organisasi. Hal itu juga berlaku dalam berjalannya sebuah roda UMKM.

Guna menunjang kesiapan implementasi SAK EMKM pada UMKM yang ada di Kabupaten Pati tentu sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten dengan bidang akuntansi. Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi sesuai dengan bidang akuntansi dan memiliki skill dalam pembuatan laporan keuangan akan menjadi daya tambah yang memperbesar kesiapan UMKM dalam melaksanakan SAK EMKM. Dalam prosesnya,

setiap UMKM diperlukan memiliki tim atau pekerja yang dapat menjalankan tugas mengemban laporan keuangan UMKM.

Meninjau dari wawancara yang telah peneliti lakukan, terdapat temuan beberapa sumber daya manusia yang masih belum siap dalam menerapkan SAK EMKM dalam UMKM yang digelutinya. Beberapa UMKM diantaranya bahkan hanya bekerja seorang diri dalam mengelola usahanya, termasuk dalam ranah pembuatan laporan. Kegiatan tersebut tentunya dapat mengurangi fokus dan konsentrasi seseorang karena terlalu banyak beban pekerjaan yang harus dilakukan.

Studi kasus yang ditemukan pada UMKM Batik Trisula mengungkapkan bahwa memang telah ada seseorang yang secara khusus mengurus keuangan. Namun, dalam implementasinya kegiatan yang dilakukan hanyalah pelaporan sederhana yang belum sesuai dengan kaidah SAK EMKM. Jika ditinjau dalam segi Pendidikan, sumber daya manusia yang mengurus bagian keuangan Batik Trisula memiliki kualifikasi sebagai lulusan SMA dengan jurusan IPS. Dengan kata lain, sumber daya manusia sudah memahami perihal dasar-dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Akan tetapi, terkait dengan SAK EMKM masih belum diketahui olehnya.

Secara lebih dalam, seseorang yang bertugas dalam pencatatan keuangan Batik Trisula memang pernah mengikuti pelatihan terkait dengan laporan keuangan. Namun hal tersebut menjadi kurang maksimal karena hanya dilakukan selama satu kali pertemuan saja. Lebih lanjut, pihaknya memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari SAK EMKM sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dalam implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati.

Temuan selanjutnya terjadi pada UMKM Batik Pamelu Bageng, dalam UMKM Batik Pamelu Bageng belum memiliki seseorang yang bertugas secara khusus dalam mengurus laporan keuangan. Segala tugas mulai dari produksi hingga pencatatan laporan keuangan hanya dilakukan oleh pemilik UMKM. Pada prosesnya, Batik Pamelu memang sudah menerapkan laporan keuangan dengan aplikasi bukuwarung dan pencatatan secara sederhana.

Ditinjau dari segi Pendidikan, pemilik Batik Pameloy yang juga bertugas mengurus proses pencatatan keuangan adalah seorang lulusan Strata 1 (S1). Pihaknya juga menyatakan paham atas akuntansi. Tetapi hal tersebut menjadi kurang maksimal karena semua tugas harus ia kerjakan seorang diri. Kesalahan input data dan kesalahan penulisan nominal dalam laporan keuangan pun sering terjadi akibat banyaknya tanggungjawab yang harus dipikulnya.

Sementara itu dalam temuan pada UMKM Vika Laundry dan Pengolahan Tahu Dodi tidak melakukan pencatatan keuangan. Sumber daya manusia yang tersedia hanya dimaksimalkan dalam pelayanan jasa laundry dan produksi olahan aneka tahu. Jika ditinjau dari segi pendidikan, kedua UMKM tersebut memiliki sumber lulusan Sekolah Menengah Atas dan tidak ada yang berfokus dalam laporan keuangan.

Hal serupa terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki tugas khusus dalam pencatatan keuangan juga terjadi pada Alyya Food. UMKM Alyya Food hanya memiliki karyawan yang ditugaskan dalam proses produksi dan pengiriman saja. Terkait masalah pencatatan keuangan, pihak Alyya Food hanya melakukan pencatatan keuangan secara sederhana dan dilakukan oleh pemilik Alyya Food. Dilihat dari segi pendidikannya, pemilik Alyya Food yang sekaligus mengurus pencatatan keuangan UMKM adalah seorang sarjana Pendidikan yang juga berprofesi sebagai guru. Banyaknya tugas yang dilakukan tentu membuat proses pencatatan keuangan menjadi kurang maksimal.

UMKM MJ Hijab juga memiliki kasus serupa dengan tidak adanya sumber daya manusia yang secara khusus bertugas dalam laporan keuangan. Dalam proses pencatatan keuangan, MJ Hijab langsung dilakukan oleh pemilik MJ Hijab. Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh pemilik MJ Hijab adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Beberapa pemaparan diatas menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Pati belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat cenderung masih manual dan sederhana. Ini seakan membuat UMKM di Kabupaten

Pati belum siap dalam implementasi SAK EMKM. Dari segi tingkat pendidikan pun masih beberapa saja yang mengenyam pendidikan tinggi dan paham akan akuntansi, selebihnya masih kurang mengetahui secara detail apa itu SAK EMKM. Adapun ringkasan tingkat pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing UMKM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan SDM UMKM

No.	Nama UMKM	Jenjang Pendidikan
1.	Batik Trisula	SMA
2.	Batik Pamelobageng	S1
3.	Vika Laundry	SMA
4.	Pengolahan Tahu Dodi	SMA
5.	Alyya Food	S1
6.	MJ Hijab	SMA

Sumber : Olahan Peneliti (2023)

c. Sarana Pendukung

Sarana pendukung merupakan salah satu hal penting yang menunjang berhasilnya implementasi SAK EMKM di UMKM Kabupaten Pati. Sarana pendukung berupa alat-alat yang dapat memudahkan dalam proses pengerjaan laporan keuangan yang memadai tentu akan membuat para pelaku UMKM menjadi lebih baik dalam mengatur keuangan usahanya. Ditinjau dari sarana pendukung dalam pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, peneliti mengelompokkan beberapa sarana penunjang yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing pelaku UMKM.

Sarana pendukung yang dapat menunjang keberlangsungan laporan keuangan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pati adalah buku catatan keuangan, laptop atau device yang mumpuni dan *software* atau aplikasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Keberadaan tiga sarana tersebut akan menjadi hal yang sangat vital dalam penulisan laporan keuangan. Mengerucut pada UMKM di Kabupaten Pati, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara kepada para pelaku UMKM.

Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada UMKM Batik Trisula menemukan bahwa sarana pendukung yang dipakai belum dapat dikatakan memadai.

Sarana yang dimiliki oleh pihak UMKM Batik Trisula hanya berupa buku catatan saja, sedangkan untuk laptop dan aplikasi pengolah laporan keuangan tidak dimiliki oleh UMKM tersebut. Hal ini menjadikan pihak UMKM Batik Trisula secara gamblang belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAK EMKM.

Kejadian serupa juga terjadi dalam Alyya Food dan MJ Hijab. Kedua UMKM tersebut hanya memiliki buku catatan saja dalam proses pembuatan laporan keuangan. Laptop atau device serta aplikasi yang menunjang dalam proses pengerjaan laporan keuangan belum dimiliki. Ini menunjukkan bahwa Alyya Food dan MJ Hijab belum memiliki kesiapan yang matang dalam implementasi SAK EMKM pada UMKM yang mereka tekuni.

Hal yang sedikit berbeda ditemukan pada UMKM Batik Pamelu Bageng, pada UMKM ini telah memanfaatkan dua sarana pendukung dalam pembuatan laporan keuangan. Sarana pendukung tersebut berupa buku catatan keuangan dan aplikasi android bernama buku warung. UMKM Batik Pamelu belum memiliki device berupa laptop dalam proses pembuatan laporan keuangan.

Hal yang berbeda juga terjadi pada UMKM Vika Laundry dan UMKM Pengolahan Tahu Dodi, kedua UMKM ini tidak melakukan proses laporan keuangan. Dengan demikian, sarana pendukung pun tidak ada sama sekali. Kedua UMKM ini menganggap laporan keuangan masih menjadi hal yang tidak terlalu penting untuk diterapkan.

Sarana pendukung yang diperlukan untuk menunjang implementasi SAK EMKM memang sangat penting untuk dimiliki. Namun pada kenyataannya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sarana pendukung memang belum memadai bahkan belum dimiliki dari masing-masing UMKM di Kabupaten Pati. Berikut gambaran sarana pendukung yang dimiliki masing-masing UMKM di Kabupaten Pati :

Tabel 4.5
Sarana Pendukung UMKM Kabupaten Pati

No.	Nama UMKM	Sarana yang Dimiliki		
		Buku Laporan Keuangan	Laptop	Aplikasi Laporan Keuangan
1.	Batik Trisula	✓	-	-
2.	Batik Pamelu Bageng	✓	-	✓
3.	Vika Laundry	-	-	-
4.	Pengolahan Tahu Dodi	-	-	-
5.	Alyya Food	✓	-	-
6.	MJ Hijab	✓	-	-

Sumber : Olahan Peneliti (2023)

2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi SAK EMKM oleh UMKM di Pati

Kendala adalah suatu kondisi dimana gejala atau hambatan dan kesulitan menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Kendala dapat diartikan sebagai hambatan, rintangan faktor dan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Kendala dapat terjadi karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi.

Kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati pun memiliki kendala-kendala tertentu. Dalam proses observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan setidaknya 3 macam kendala dalam implementasi SAK EMKM pada UMKM Kabupaten Pati. Kendala tersebut berupa kurangnya waktu dalam pembuatan laporan keuangan dengan SAK EMKM, Kurangnya Pengetahuan tentang SAK EMKM dan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

a. Kurangnya Waktu dalam Pembuatan Laporan Keuangan dengan SAK EMKM

UMKM yang ada di Kabupaten Pati kebanyakan masih dikelola secara mandiri oleh para pemiliknya, walaupun diperlukan karyawan maka karyawan tersebut masih berasal dari kalangan keluarga dan sanak saudara. Beberapa UMKM bahkan hanya memanggil karyawan dalam kondisi tertentu saja, seperti saat sedang dalam kondisi ramai pesanan dan hari-hari tertentu. Kondisi

demikian membuat proses manajemen dalam badan UMKM menjadi tidak berjalan dengan baik.

Pemilik UMKM yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola segala aktivitas UMKM menjadi lebih sibuk dan harus pandai membagi waktu untuk kegiatan pemesanan barang, produksi, pelayanan jasa dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut akhirnya berakibat pada kurangnya waktu yang tersedia untuk alokasi pembuatan laporan keuangan. Hal ini tentu menjadikan sektor laporan keuangan menjadi bagian yang sering terabaikan oleh para pelaku UMKM.

Beberapa pemilik UMKM bahkan memiliki profesi lain selain mengelola UMKM nya. Hal ini menjadikannya semakin sibuk dan membagi fokusnya pada banyak hal. Beban pekerjaan yang banyak otomatis berdampak pada menurunnya kekuatan fisik yang mereka hadapi, sehingga lebih mudah merasa kelelahan. Faktor tersebut membuat mereka harus menepi untuk istirahat. Waktu dalam pembuatan laporan keuangan pun menjadi tidak ada.

Kendala kurangnya waktu yang dapat dialokasikan untuk pembuatan laporan keuangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pelaku UMKM. Dengan segala aspek yang harus diurus, maka penting untuk memikirkan adanya manajemen waktu yang baik apalagi dalam hal untuk pembuatan laporan keuangan. Terlebih lagi dengan adanya SAK EMKM, maka pihak UMKM harus segera disadarkan untuk menerapkan SAK EMKM pada UMKM yang dimiliki.

b. Kurangnya Pengetahuan tentang SAK EMKM

Sebelum melakukan sesuatu, maka wajib hukumnya untuk mengetahui dan memahami perihal sesuatu tersebut. Layaknya dalam proses pembelajaran, maka perlu adanya teori sebelum praktik. Sama halnya dengan analogi tersebut, sebelum penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati maka perlu adanya pemahaman yang ditanamkan pada para pelaku UMKM terlebih dahulu.

Realitanya, para pelaku UMKM di Kabupaten Pati masih belum mengetahui tentang apa itu SAK EMKM. Pelaku UMKM masih tidak memahami perihal bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Walaupun standar pembuatan laporan keuangan sudah diturunkan dari SAK ETAP ke SAK

EMKM, namun hal ini masih belum dipahami pula oleh para pelaku UMKM.

Kurangnya pemahaman atas SAK EMKM ini tentu menjadi kendala dalam implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati. Minimnya pengetahuan atas SAK EMKM juga tidak luput dari kurangnya sosialisasi atau pengenalan terkait SAK EMKM pada pihak UMKM. Para pelaku UMKM mengakui bahwa pernah ada pelatihan terkait pembuatan laporan keuangan, namun hal tersebut menjadi kurang maksimal karena hanya dilakukan sekali dalam proses awal berdirinya UMKM. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM tidak mengetahui secara detail bagaimana cara membuat laporan keuangan dengan SAK EMKM.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Mumpuni

Sumber Daya Manusia menjadi faktor penunjang yang sangat vital dalam keberlangsungan UMKM. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni dalam bidangnya adalah sebuah hal yang sangat diperlukan oleh UMKM. Sumber Daya Manusia yang baik akan berdampak pada berhasilnya UMKM dalam berbagai hal, seperti manajemen produksi, laba maksimal dalam penjualan, transparansi laporan keuangan yang bagus hingga jalannya sistem perusahaan yang baik.

Ranah pembuatan laporan keuangan bukanlah hal sederhana yang dapat dikerjakan oleh orang-orang tertentu saja. Diperlukan keahlian khusus dalam proses pembuatan laporan keuangan. Sumber daya dengan kualifikasi tertentu yang memahami betul tentang laporan keuangan sungguh diperlukan dalam implementasi SAK EMKM.

Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Pasalnya, kebanyakan UMKM masih belum terorganisir dengan baik dari segi karyawan. Fenomena ini menjadikan UMKM tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal pembuatan SAK EMKM. Dengan demikian proses implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati menjadi terkendala dan belum bisa diterapkan.

Meninjau dari hasil penelitian yang bersumber dari wawancara maka dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Pati masih belum dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan baik. Hal ini

berkaitan dengan adanya kendala dari masing-masing UMKM yang masih belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dan secara khusus mengurus perihal laporan keuangan. Dari 6 sampel UMKM yang diteliti hanya 2 diantaranya memang sudah berpendidikan sarjana dan sisanya masih berpendidikan SMA, dan semua sumber daya masih belum mengetahui betul perihal SAK EMKM. Selain itu sarana pendukung dari masing-masing UMKM juga belum memadai untuk melakukan proses implementasi SAK EMKM. Hanya UMKM Batik Trisula, Batik Pamelu, Alyya Food dan MJ Hijab yang memiliki buku catatan keuangan, sedangkan untuk UMKM Pengolahan Tahu Dodi dan Vika Laundry masih belum memiliki buku catatan keuangan. Namun sarana berupa buku catatan keuangan saja masih belum cukup untuk dapat mengimplementasikan SAK EMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Puji Lestari dengan judul “Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno” yang menghasilkan bahwa pelaku UMKM pengrajin mebel desa Catak Gayam Mojowarno belum siap dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM karena pembuatan laporan masih bersifat sederhana dan tidak sesuai standar. Hal senada juga terjadi pada penelitian oleh Cindy Ayu Amami dkk dengan judul “Model Laporan Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM” yang menghasilkan temuan bahwa pada UMKM UD. Perdana Collection belum siap dalam penerapan model laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM karena belum adanya sumber daya yang mumpuni dalam pembuatan SAK EMKM. Demikian pula yang terjadi pada penelitian oleh Ahmad Solikin dkk serta penelitian oleh Kuntum Latifatur yang menghasilkan temuan bahwa penerapan SAK EMKM masih belum dapat dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia dan pembuatan laporan yang masih dalam bentuk sederhana. Namun hasil penelitian kali ini sedikit berbeda dengan penelitian oleh Luh Gede Kusuma Dewi dkk yang menghasilkan temuan bahwa SDM masing-masing sampel penelitiannya telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang SAK EMKM dan sudah siap untuk mengimplementasikannya. Dengan demikian maka kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada UMKM di Kabupaten Pati dapat dirangkum dalam tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Kesiapan UMKM Kabupaten Pati

No	Aspek	Batik Trisula	Batik Pamelolo	Vika Laundry	Pengolahan Tahu Dodi	Alyya Food	MJ Hijab
1	Persepsi	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif	Positif
2	SDM	Lulusan SMA	Lulusan S1	Lulusan SMA	Lulusan SMA	Lulusan S1	Lulusan SMA
3	Sarana Pendukung	Buku Catatan Keuangan	Buku Catatan Keuangan, Aplikasi Laporan Keuangan berbasis Android	Tidak ada	Tidak Ada	Buku Catatan Keuangan	Buku Catatan Keuangan
4	Kendala	Sumber daya manusia belum memadai, sarana pendukung belum memadai	Sumber daya manusia belum memadai, sarana pendukung belum memadai	Sumber daya manusia belum memadai, sarana pendukung belum memadai	Sumber daya manusia belum memadai, sarana pendukung belum memadai	Sumber daya manusia belum memadai, sarana pendukung belum memadai	Sumber daya manusia belum memadai, sarana pendukung belum memadai